

## UPAYA PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU MELALUI PROGRAM SERTIFIKASI DI SDN 7 SINGKAWANG

Oleh: Rheza Raviandi

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.  
2014. [Raviandi\\_rheza@yahoo.com](mailto:Raviandi_rheza@yahoo.com)

### Abstrak

Artikel ini mengangkat masalah yaitu pada program sertifikasi dalam meningkatkan kinerja, pemberian dana insentif guru, dan belum sepenuhnya memenuhi kualifikasi akademik S1 di SDN 7 Singkawang. Permasalahan yang dihadapi belum sepenuhnya peningkatan kinerja profesionalisme guru berjalan dengan baik, sering terhambatnya pemberian dana tunjangan profesi guru yang berdampak pada kinerja guru. Masih banyak para guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik S1. Artikel ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan sertifikasi guru sehingga tujuan peningkatan profesionalisme guru dapat tercapai sesuai hasil yang diharapkan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan paradigma kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan sertifikasi yang dijalankan di SDN 7 Singkawang sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Dari segi proses pelaksanaan berjalan dengan lancar dan bisa dikatakan sukses, sehingga dampak yang dirasakan dari hasil kebijakan tersebut adalah mampu memberikan kesejahteraan dan meningkatkan kinerja guru. Saran untuk penelitian ini adalah . untuk guru-guru diharapkan semakin meningkatkan kualitas kemampuan dirinya dalam memberikan proses pembelajaran salah satunya dengan meningkatkan kualifikasi akademik sehingga dalam pemberian sertifikasi ini tidak ada lagi yang berdasarkan umur minimal rata-rata sudah S1.

**Kata Kunci: Program Sertifikasi, Profesionalisme Guru, Meningkatkan Pendidikan**

### Abstrak

This article raises issues in certification program in improving performance and incentives teacher, and has not fully qualified bachelor's degree in public elementary school 7 Singkawang. The problems in face not fully performance improvement teacher goes well, professionalism often it seems that fund allowance the profession of a teacher an impact on the performance of a teacher. I have still many teachers who do not meet academic qualifications a university degree. This article is intended to provide an understanding of the implementation of the certification of teachers so that teachers can be professionalism improvement objectives are achieved as a result of the expected. This research included in this type of descriptive study with a qualitative paradigm. based on the research conducted, the author concludes that the implementation of the certification on the run in primary school the country 7 Singkawang already can be said to be doing well. In terms of the implementation process runs smoothly and could be said to be a success, so that the perceived impact of the results of these policies is capable of delivering prosperity and improve the performance of teachers. Suggestions for research is. teachers are expected to further improve the quality of her ability in delivering the learning process by improving academic qualifications so that the awarding of this certification is no longer based on the age of the average minimum is S1.

**Keywords: program certification, professionalism of teacher, improving education**

## A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Sertifikasi Guru merupakan salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Agar sertifikasi guru dapat direalisasikan dengan baik perlu pemahaman bersama antara berbagai unsur yang terlibat, baik di pusat maupun di daerah. Guru merupakan bagian terpenting dalam proses belajar mengajar, baik di jalur pendidikan formal maupun informal. Mereka dituntut tidak hanya sebagai pendidik yang harus mampu mentransformasikan *knowledge, values, dan skill*, tetapi sekaligus sebagai penjaga moral bagi anak didik. Bahkan tidak jarang, para guru dianggap sebagai orang kedua, setelah orang tua anak didik dalam proses pendidikan secara global (jamal ma'mur asmani, 2011).

Dengan berlandaskan Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam jabatan, yang memiliki tujuan yaitu untuk menentukan kebijakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat guru serta meningkatkan profesionalisme guru oleh karena itu seluruh elemen yang terkait dalam program sertifikasi seperti perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota/Kabupaten, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah Guru, serta masyarakat diharapkan mensinergikan tujuan yang telah ditetapkan.

Disadari bahwa guru profesional merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi, seiring dengan semakin meningkatnya persaingan yang semakin ketat dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Diperlukan orang-orang yang memang benar-benar ahli dibidangnya, sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya agar setiap orang dapat berperan secara maksimal, termasuk guru sebagai sebuah profesi yang menuntut kecakapan dan keahlian tersendiri. Selanjutnya sebagai tenaga profesional guru dalam memberikan pelayanan pendidikan juga dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan juga mampu memberikan pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Program Sertifikasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, dan meningkatkan kesejahteraan para guru tidak menutup kemungkinan

adanya hambatan-hambatan, sehingga program yang dijalankan masih belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berdasarkan paparan di atas, penulis akan melihat bagaimana implementasi dari Sertifikasi guru ini membawa pengaruh terhadap kinerja guru pada SDN Negeri 7 Singkawang. Berdasarkan data pada keadaan guru SDN 7 Singkawang Barat, bahwa lebih dari 50% guru sudah memiliki sertifikat pendidik. Namun dari hasil pengamatan sementara kinerja guru di SDN 7 Singkawang dalam memberikan pelayanan pendidikan secara profesional dirasa masih rendah.

Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru pada hakekatnya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam memberikan pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, sangat tergantung pada sikap dan perilaku guru sebagai tenaga pendidik yang meningkatkan mutu pendidikan untuk itu, guru tersebut harus sadar dan mampu menjalankan tugasnya secara profesional khususnya dalam hal merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan. Berdasarkan paparan di atas, penulis akan melihat bagaimana implementasi dari Sertifikasi guru ini membawa pengaruh terhadap kinerja guru pada SDN Negeri 7 Singkawang. Fokus penelitian: Hasil Implementasi Program Sertifikasi Guru di Sekolah Dasar Negeri 7 Singkawang. Rumusan penelitian: Bagaimanakah hasil implementasi program sertifikasi guru di Sekolah Dasar Negeri 7 Singkawang ?. Tujuan penelitian: ingin mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana hasil pelaksanaan sertifikasi dan tujuan-tujuan peningkatan profesionalisme guru di SD Negeri 7 Singkawang tersebut apakah sudah tercapai sesuai hasil yang diharapkan.

## B. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

Jenkins (1978; 15) menyebutkan bahwa kebijakan Negara (*public policy*) "*a set of interrelated decision taken by a political actor or group of actor concerning the selection of goal and the means of achieving the within a specified situation where these decision should, in principle, be within the power of these actors*" (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang pelaku/aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam

batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor politik tersebut).

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau secara garis besar hal ini ialah dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak dan pada umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, baik yang bersifat individual maupun kelompok atau instansi. Subarsono (2006:99101) menyatakan agar kebijakan berjalan mulus, sangat tergantung pada model proses implementasi kebijakan disuatu program. Model proses implementasi kebijakan tersebut ialah:

- 1) Standar dan sasaran Kebijakan  
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan, misalnya tujuan kebijakan, arah kebijakan, dan sasaran kebijakan.
- 2) Sumber-sumber kebijakan  
Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik dukungan sumber daya manusia (human resources) meliputi keterampilan dan keahlian maupun sumber daya alam (non human resources)
- 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas  
Dalam keberhasilan sebuah program perlu dukungan, kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain.
- 4) Karakteristik agen pelaksana  
Mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola - pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi
- 5) Kondisi- kondisi ekonomi, sosial dan politik  
Mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan, karakter para partisipasi, bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- 6) Disposisi implementor  
Mencakup respon implementor terhadap kebijakan yang mempengaruhi kebijakan, pemahamannya terhadap kebijakan, preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Kebijakan adalah keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Menurut Dunn (2004:71), "A Policy system, or the overall

*institutional pattern which policy made, involves interrelationships among three elements: public policies, policy stakeholders, and policy environment*". Maksudnya system kebijakan atau pola institusional melalui mana kebijakan dibuat, melibatkan tiga elemen yang memiliki hubungan timbal balik: kebijakan publik, pemangku kepentingan kebijakan, dan lingkungan kebijakan.

Implementasi kebijakan publik memainkan peranan penting dalam merealisasikan misi suatu kebijakan publik, tetapi tidak berarti bahwa implementasi kebijakan publik terpisah dari tahapan formulasi. Fadillah Putra (dalam Tachjan, 2006:xii), menyatakan bahwa "keberhasilan suatu kebijakan publik tergantung pada tatanan kebijakan publik makro dan mikro, artinya formulasi kebijakan makro yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, keberhasilan implementasinya akan dipengaruhi kebijakan publik operasional serta kelompok sasaran dalam mencermati lingkungan". Salah satu tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada proses implementasinya. Kegiatan implementasi dilakukan setelah kebijakan memperoleh pengesahan dari legislatif dan alokasi sumber dayanya juga telah disetujui. Dalam proses implementasi suatu kebijakan, diperlukan suatu usaha dan kesabaran yang tinggi oleh pemerintah. William M. Dunn menyatakan bahwa : "implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan sampai tercapai hasilnya". Perhatian pertama pada tahap undang-undang adalah pada pemilihan arah dan tindakan serta pengamatan bahwa hal tersebut diikuti sampai selesainya waktu pelaksanaan dan tidak pada pemahaman sifat masalah. Dalam pemilihan arah dan tindakan didasarkan pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dari suatu kebijakan. Tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dioprasionalkan dalam bentuk tindakan menuntut kejelasan dan konsistensi atau keseragaman yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi sehingga para pejabat pelaksana melaksanakan tindakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sedangkan, George C. Erdward (dalam budi winarno, 2007:174) mendefinisikan studi implementasi kebijakan adalah : "salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya".

Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami

kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Fokus analisis implementasi kebijakan berkisar pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena *street-level-bureaucrats* tidak dilibatkan dalam formulasi kebijakan. Berangkat dari perspektif tersebut, maka timbullah pertanyaan-pertanyaan, sebagai berikut:

1. Sampai sejauhmana tindakan-tindakan pejabat pelaksana konsisten dengan keputusan kebijakan tersebut?
2. Sejauhmanakah tujuan tujuan kebijakan tercapai ?
3. Faktor-faktor apa yang secara prinsipil mempengaruhi output dan dampak kebijakan ?
4. Bagaimana kebijakan tersebut diformulasikan kembali sesuai pengalaman lapangan?

Empat pertanyaan tersebut mengarah pada inti sejauhmana tindakan para pelaksana sesuai dengan prosedur dan tujuan kebijakan yang telah digariskan para pembuat kebijakan di level pusat. Fokus tersebut membawa konsekuensi pada perhatian terhadap aspek organisasi atau birokrasi sebagai ukuran efisiensi dan efektifitas pelaksana kebijakan. Merilee S. Grindle (dalam Leo Agustino, 2008: 154). Ada dua variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcome*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu :

1. dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai, Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :
  - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
  - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Adapun tujuan sertifikasi guru adalah :

- a. menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen.
- b. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan.
- c. meningkatkan martabat guru.
- d. meningkatkan profesionalitas guru

Adapun manfaat sertifikasi guru dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.
- b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional.
- c. Meningkatkan kesejahteraan guru

Istilah profesionalisme berasal dari kata *professio*, dalam Bahasa Inggris *profession* memiliki arti sebagai berikut: *A vocation or occupation requiring advanced training in some liberal art or science and usually involving mental rather than manual work, as teaching engineering, writing, etc.* (Javis, 1983: 11). Dari kata profesional tersebut melahirkan arti *professional quality, status, etc* yang secara komprehensif memiliki arti lapangan kerja tertentu yang diduduki oleh orang-orang yang memiliki kemampuan tertentu pula (Suyanto, 2008:22). Pada dasarnya pengembangan sumber daya manusia dalam rangka menuju profesional guru, menurut pendapat Wahab (2006:103) memiliki dua tujuan utama , yaitu meliputi; *pertama* untuk menutup "gap" antara kecakapan atau kemampuan karyawan dengan permintaan jabatan; *kedua* meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja guru dalam mencapai sasaran-sasaran kerja yang ditetapkan.

Sedangkan Handoko (2004:75) mengemukakan bahwa tujuan yang diharapkan dari pengembangan sumber daya manusia adalah:

Untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral guru supaya prestasi kerjanya baik dan mencapai hasil yang optimal. Pengembangan sumber daya manusia sangat penting kaitanya dengan upaya menghilangkan kesenjangan antara kemampuan kerja dengan tuntutan tugas sekaligus mampu menghadapi tugas-tugas sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Kebijakan profesionalisme seseorang menurut Saudagar (2009:41) mencerminkan dua aspek utama, yakni :

1. Aspek keahlian, yaitu berupa kebijakan penyiapan sumber daya aparatur yang profesional, yang benar-benar dilandasi pada hasil kajian mengenai adanya potensi, kondisi dan kebutuhan nyata pemerintah.

2. Aspek perilaku, yakni pengaturan mengenai penyiapan sumber daya aparatur yang profesional perlu semakin diarahkan pada internalisasi prinsip-prinsip moral dan etika aparatur yang menjadi landasan terbangunnya akuntabilitas.

### C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang tepat digunakan jenis penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif. Menurut faisal (2002:12) bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisa dan menafsirkan kondisi-kondisi sekarang ini, termasuk berbagai tipe penelitian sehingga ditemukan hubungan yang mungkin terjadi diantara variabel-variabel. Berdasarkan pendapat sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian deskriptif adalah cara menggambarkan atau melukiskan gejala berdasarkan data dan fakta secara aktual pada saat penelitian berlangsung dilapangan sebagaimana adanya, sesuai dengan tujuan penelitian. pada penelitian kualitatif peneliti melaksanakan kegiatan penelitian secara objektif terhadap kenyataan subjektif dari yang diteliti. Dengan demikian, pelaksanaan penelitian itu sendiri tidaklah bersifat subjektif, tetapi tetap dilaksanakan secara objektif keilmuan. Dalam hal ini subjektifitas berlaku terhadap kenyataan yang diteliti, dalam arti kenyataan tersebut dilihat dari sudut mereka yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 7 singkawang. dipilihnya lokasi ini, berdasarkan atas pertimbangan bahwa SD Negeri 7 singkawang dalam pelayanan pendidikan melalui profesionalisme guru masih dirasa belum terlaksana secara maksimal. Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat sekolah yang dalam hal ini diwakili:

- a. Kepala sekolah SD Negeri 7 Singkawang.
- b. Dewan Guru
- c. Pengurus komite SD Negeri 7 Singkawang
- d. Kepala Bidang TK dan SD Dinas Pendidikan Kota Singkawang
- e. Siswi SD Negeri 7 Singkawang

Teknik Pemilihan Subjek penelitian digunakan dengan teknik (*Purposive*) yaitu suatu teknik penarikan informasi dengan menunjuk langsung orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan atau yang terlibat langsung dalam permasalahan yang akan diteliti. Objek dalam penelitian ini yaitu masalah peraturan perundang – undangan mengenai kebijakan sertifikasi pada guru guna untuk meningkatkan profesionalisme agar kualitas pelayanan pendidikan semakin menjadi lebih

baik. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: teknik observasi, teknik wawancara, teknik dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan cara membaca, meneliti, dan mempelajari seluruh data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun studi dokumen. Data-data tersebut kemudian dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maknanya. Selanjutnya dilakukan untuk menguji keabsahan data, maka peneliti memilih dengan teknik member cek. Teknik ini dilakukan dengan menanyakan ulang kepada informan tentang garis besar permasalahan yang diajukan sebelumnya. Garis besar yang ditanyakan ulang dengan tujuan agar informan dapat memperbaiki kekeliruan ucapan, atau dapat mengubah sesuatu yang kurang tepat, kurang sempurna serta untuk menyesuaikan data yang diperoleh dengan data akhir sebagai pengingat.

### D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah analisis hasil dari wawancara dengan beberapa narasumber yang peneliti mintai keterangannya untuk menjelaskan dan memberikan informasi yang peneliti perlukan. disini peneliti mengambil dua aspek penting dari empat aspek penelitian pada skripsi. berikut adalah hasil dari pelaksanaan sertifikasi.

#### • Peningkatan Proses dan Mutu Pendidikan

berdasarkan wawancara yang dinyatakan oleh bapak Drs. Misrun M. Nur. Selaku kepala sekolah SDN 7 Singkawang

*“alhamdulillah selama ini memang hampir selama 3 tahun ini mutu pendidikan disekolah ini cukup baik meningkat setiap tahunnya”*

Bapak Misrun mengungkapkan bahwa proses belajar mengajar dan mutu pendidikan di SDN 7 Singkawang dalam 3 tahun ini dirasakan cukup baik dan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Begitu juga yang di ungkapkan ibu Katarina wati selaku pengutus komite sekolah dalam wawancaranya mengungkapkan .

*“ia terutama masalah persiapan-persiapan untuk mengajar kan kita siapkan dengan dituntut harus ada tapi walaupun tidak kita ikut sertifikasi guru yang tidak ikut sertifikasi harus mempersiapkan alat proses belajar mengajar segara RPP, silabus segala apa itu semua buat kisi-kisinya semua dibuat kaena syarat kita mengajar harus ada itu”*

Sementara itu ibu Ngadjiah selaku dewan guru juga mengungkapkan dalam wawancaranya

*“alhamdulillah daan ade agek yang molor semue udah rajin”*

Disini dari apa yang telah diungkapkan berbagai narasumber yang peneliti wawancarai mengenai peningkatan proses dan mutu pendidikan yaitu sudah sangat baik, mereka menganggap khususna yang telah disampaikan oleh pengurus komite sekolah yaitu ibu Katarina wati proses belajar mengajar menjadi tanggung jawab bagi para guru dituntut mempersiapkan alat dalam proses belajar mengajar seperti Rpp, silabus dan lain-lain yang menjadi syarat keharusan dalam mengajar, seperti diungkapkan kembali oleh dewan guru yaitu ibu Ngadjiah karena ada tanggung jawab keharusan guru menyiapkan alat proses belajar-mengajar. Guru-guru semakin rajin dan tidak ada lagi yang molor, dengan adanya ini menyebabkan mutu pendidikan di SDN 7 Singkawang semakin meningkat meskipun, tidak dipungkiri dalam prosesnya pasti ada kendala yang dihadapi, seperti yang di ungkapkan bapak H. Rasyidi SH. M.Si. Kepala Bidang TK dan SD Dinas Pendidikan Kota Singkawang

*“pada umumnya meningkat tapi tidak kadang juga mengalami hambatan faktor kurangnya pengawasan kepada guru tersebut sehingga ada beberapa guru yang tidak menjalankan fungsinya sebagai guru”*

Bapak H. Rasyidi SH. M.Si menyatakan meskipun pada umumnya proses dan mutu pendidikan telah meningkat namun bapak Rasyidi menilai masih ada beberapa hambatan untuk menjalankan dan meningkatkan proses dan mutu pendidikan salah satu faktor utamanya adalah kurangnya pengawasan terhadap guru, sehingga bapak Rasyidi menyatakan ada beberapa guru yang tidak menjalankan fungsinya sebagai guru. Namun secara keseluruhan dari apa yang telah diungkapkan nara sumber dari masing-masing wawancara proses dan mutu pendidikan di SDN 7 Singkawang berjalan dengan baik dan menunjukkan hasil mutu pendidikan dikatakan selalu meningkat terhitung hamper selama 3 tahun. Terlepas dari pada itu meningkatnya proses belajar mengajar dikarenakan sejak mendapatkan sertifikasi cara mengajar guru mulai sedikit berbeda dibandingkan pada saat guru-guru tersebut belum mendapatkan sertifikasi karena metode cara belajar mengajar yang disampaikan guru-guru sudah bervariasi tidak monoton seperti sebelumnya. Hal ini diungkapkan bapak misrun dalam wawancaranya.

**Rheza Raviandi**

*Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura*

*“jadi pada umumnya guru yang sudah disertifikasi lebih cara mengajarnya dibandingkan dengan yang sebelumnya karena mereka-mereka itu selalu menggunakan metode yang bervariasi tidak monoton tidak kayak seperti sebelumnya”*

Metode pengajaran yang bervariasi tersebut yaitu dengan menggunakan alat-alat elektronik, hal ini kembali lagi penulis tanyakan kepada seorang siswi SDN 7 Singkawang sedang duduk dibangku kelas 6 SD, siswi tersebut bernama Riska yang mengungkapkan ketika penulis menanyakan cara ibu/bapak gurunya mengajar dikelas dengan menggunakan alat elektronik dan dalam ungapannya menyebutkan.

*“ade bang”*

Lanjut lagi guru apa yang sering menggunakan metode elektronik tersebut dalam wawancaranya siswi tersebut menyatakan.

*“guru bahasa inggris”*

Kemudian untuk selanjutnya lagi penulis mewawancarai yaitu mengenai cara guru bahasa inggris tersebut megajar dengan menggunakan media elektronik, Riska mengungkapkan.

*“biase memutar film cerite pake layar besar, biase pake lagu”*

Dari apa yang diungkapkan oleh seorang siswi tersebut. Salah satu guru yang menggunakan proses belajar mengajar yang bervariasi adalah guru bahasa inggris, dengan menggunakan media elektronik yaitu berupa laptop dan layarnya dengan menggunakan infokus, dengan cara tersebut diharapkan agar murid-murid lebih mudah mengerti. selanjutnya mengenai siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar, dalam wawancaranya bapak misrun menyatakan.

*“ remedial untuk disekolah kita eeee minimal 2 kali remedialnya memang setiap kali yang tidak tuntas diadakan remedial paling sedikit 2 kali”*

Begitu juga seorang dewan guru mengungkapkan yaitu ibu ngadisah

*“ia kamu tetap mengadakan remedial bagi siswa yang belum tuntas”*

Mengenai siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar, diadakan kegiatan remedial yang bertujuan agar siswa lebih memahami metode yang

disampaikan. Kegiatan remedial ini diberikan kesempatan bagi para peserta didik yaitu paling sedikit 2 kali. Dari proses pembelajaran seperti itu maka akan berdampak pada mutu pendidikan yang dapat dilihat dari nilai rata-rata ujian nasional. Seperti yang diungkapkan bapak Drs. Misrun M. Nur dalam wawancaranya.

*“mulai tahun 2007,2008, yaitu nilainya cukup lumayan kemudian pada akhir ini kemaren pada umumnya lebih meningkat nilainya rata-rata diatas 7.00*

Dengan demikian dalam peningkatan proses dan mutu pendidikan di SDN 7 Singkawang sudah dapat memberikan peningkatan dimana dapat dilihat dari data yang disampaikan bapak Misrun selaku kepala sekolah mulai dari tahun 2007,2008 hingga sekarang terus mengalami peningkatan dikarenakan juga manajemen yang dilaksanakan bapak Drs. Misrun M. Nur cukup baik. Hal ini disampaikan keterangannya dari bapak H. Rasyidi SH. M.Si selaku kepala bidang TK dan SD dinas pendidikan kota Singkawang dalam wawancaranya mengatakan.

*“eee untuk ujian nasional pada umumnya meningkat terus untuk SD 7 karena managemennya cukup baik”*

#### • **Peningkatan Profesionalisme Guru**

Berdasarkan wawancaranya yang dilakukan bersama bapak Drs. Misrun M. Nur beliau mengatakan.

*“Eee kalau saya perhatikan tiap tahun itu ada peningkatan baik dari segi apanamanya dari proses belajar mengajar eee kemudian didalam memberikan metode pembelajaran itu apa namanya selalu berkembang”*

Dari hasil wawancara menunjukkan guru-guru yang sudah disertifikasi sudah efektif dalam mengembangkan kompetensinya sebagai guru yang professional. Hal ini dapat terlihat peningkatan proses belajar mengajar yakni dikarenakan kemampuan guru menguasai materi pelajaran yang diampu, selain itu dampak yang dirasakan dari sertifikasi adalah semakin meningkatnya kesejahteraan sehingga guru-guru bisa membeli dan mempersiapkan metode belajar dengan menggunakan elektronik. Ini diungkap oleh bapak H. Rasyidi SH. M.Si dalam wawancaranya.

*“Ya dengan adanya sertifikasi, dengan dapatnya kebijakan sertifikasi dapat membeli barang-barang yang salah satu contoh yaitu latop sehingga tingkat pembelajaran sudah menggunakan*

*teknologi sehingga pembelajaran akan lebih meningkat”*

Paparan diatas yang telah dikatakan oleh bapak H. Rasyidi SH. M.Si dengan mendapatkannya sertifikasi sebagai kesejahteraan para guru. Guru dapat membeli dan menyiapkan sendiri proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan misalnya dengan menggunakan latop dan sebagainya. Dengan meningkatnya profesionalisme guru, para guru yang telah bersertifikasi tidak terpaksa lagi dengan menggunakan metode ceramah, namun lebih kreatif dengan menambah perangkat media pembelajaran lain yang dapat menunjang kenyamanan dan kemudahan dalam belajar mengajar khususnya untuk mengembangkan potensi siswa, membangkitkan motivasi belajar siswa, baik untuk memperoleh pemahaman kesadaran diri dan menciptakan suasana belajar yang nyaman. Dari implementasi kebijakan sertifikasi guru yang dijalankan di SD 7 Singkawang mempunyai dampak yang mana dampak tersebut berpengaruh kepada kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai agen pembelajaran. Berikut pengaruh meningkatnya profesionalisme guru di SD 7 Singkawang yang dikatakan bapak Drs. Misrun M. Nur

*” Itu ada dua macam ya memang guru itu apanamanya punya harapan dengan sertifikasi sangat berpengaruh besar biasanya sering izin dengan adanya sertifikasi sudah tidak sering izin lagi izin pun memang waktu-waktu tertentu yang memang sangat penting*

Bapak Misrun menjelaskan salah satu contoh berpengaruhnya kebijakan sertifikasi guru di SD 7 Singkawang itu adalah misalnya guru yang biasa sering izin dengan adanya sertifikasi guru tersebut sudah tidak sering izin lagi, izin pun memang waktu-waktu tertentu yang memang sangat penting. Begitu juga disampaikan bapak H. Rasyidi SH. M.Si mengenai pengaruh sertifikasi yang di SD 7 Singkawang

*“otomatis kinerja guru akan lebih baik dan akan lebih meningkat karena kesejahteraannya meningkat”*

Berdasarkan yang disampaikan bapak Rasyidi dengan berjalannya kebijakan sertifikasi yang dilaksanakan di SD 7 Singkawang, secara tidak langsung kinerja guru akan lebih baik dikarenakan meningkatnya kesejahteraan guru. Selanjutnya dalam peningkatan profesionalisme guru, itu dilihat juga dari kedisiplinan guru-guru tersebut dalam

melaksanakan tugas karena kedisiplinan ini juga merupakan faktor penting dalam proses belajar mengajar. Berikut peneliti mewawancarai bapak Drs. Misrun M. Nur mengenai kedisiplinan guru-guru di SD 7 Singkawang.

*“Kalau kebetulan di SD kami ini ee kalau untuk disiplin memang sangat dijunjung tinggi karena pelaksanaan disiplin itu sebenarnya selalu kami terapkan sebelum adanya sertifikasi tapi setelah ada sertifikasi malah kita tingkakan lagi eee semua personil sekolah pulangnyanya itu setengah jam setelah anak itu pulang kerumah”*

Mengenai kedisiplinan di SD 7 Singkawang yang telah disampaikan bapak Misrun dalam wawancaranya dalam melaksanakan tugasnya guru-guru sudah sangat disiplin dimana kedisiplinan tersebut memang sangat dijunjung tinggi karena memang selalu diterapkan jauh sebelum adanya mendapatkan sertifikasi, ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sudah sepenuhnya membangkitkan etos kerja yang baik. Hal tersebut dilihat dari peran guru sebagai pembimbing dalam proses belajar mengajar sudah optimal. Dalam proses belajar mengajar dikelas, sangat ditentukan oleh keberadaan para guru, karena faktor penting yang menentukan proses belajar mengajar itu adalah diantaranya adalah kedisiplinan para guru. Guru yang professional adalah guru yang mencurahkan sebagian besar waktunya dalam proses belajar mengajar. Kemudian bapak H. Rasyidi SH. M.Si menerangkan lebih lanjut selaku pihak dinas pendidikan yang selalu memantau perkembangan aktifitas proses belajar mengajar di SD 7 Singkawang menerangkan.

*“ya khususnya di SD 7 Singkawang karena manajemennya cukup baik dan kepala sekolahnya dipimpin bapak Misrun cukup baik maka disiplin SD 7 memang kenyataannya sangat baik”*

Menurut yang disampaikan oleh bapak Rasyidi manajemen yang berada di SD 7 tersebut sudah sangat baik sehingga pelaksanaan yang diterapkan oleh bapak Misrun kenyataannya sangat baik. Namun dalam pelaksanaan kebijakan implementasi yang dijalankan di SD 7 tersebut terdapat beberapa kendala yang bisa menjadikan faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi yaitu mengenai pemberian insentif masih menjadi perhatian atau masih menjadi catatan besar, sebab bisa juga mempengaruhi profesionalisme guru dalam menjalankan tugasnya. Berikut diungkapkan oleh bapak Drs. Misrun M. Nur mengenai kendala dalam pemberian dana insentif bagi guru, dalam wawancaranya mengatakan.

*“Kalau saya perhatikan yang menjadi penghambat yaitu pertama dari pendidikan guru itu, kemudian ee lingkungan dimana guru itu berada,*

**Rheza Raviandi**

*Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura*

*kalau kita perhatikan dan emang dari kepribadian guru itu sendiri selain itu juga pemberian insentif pemberian tunjangan profesi itu sendiri sering terlambat pencairannya hingga sekarang malah udah 6 bulan dana tersebut belum dicairkan*

Dalam masalah insentif ini ada beberapa faktor yang disampaikan oleh bapak Misrun yaitu yang pertama dari pendidikan guru itu sendiri, dan juga lingkungan dimana guru itu berada sehingga dapat memberikan pengaruh yang kurang baik khususnya bagi kepribadian guru itu sendiri selain itu juga yaitu masalah pemberian tunjangan profesi itu sendiri yangmana sering terlambat pencairannya hingga masalah pencairan ini sudah terlambat hingga 6 bulan. Selanjutnya disampaikan pula oleh dewan guru yaitu ibu ngadisah beliau juga mengeluhkan adanya keterlambatan dana tunjangan profesi, dalam wawancaranya mengatakan.

*“jelas tunjangan sertifikasi itu suka datangnya lambat”*

Masalah insentif ini seharusnya menjadi perhatian pembuat kebijakan agar kinerja pelaksana kebijakan meningkat seiring dengan reward yang akan mereka terima jika mereka berhasil melaksanakan sebuah kebijakan pemberian insentif seharusnya lebih lancar sehingga menjadi penyemangat kerja.

#### E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru di SDN 7 Singkawang telah berjalan dengan baik. Dari segi proses pelaksanaan berjalan dengan lancar dan bisa dikatakan sukses, sehingga dampak yang dirasakan dari hasil kebijakan tersebut adalah mampu menunjukkan hasil mutu pendidikan sehingga dikatakan selalu meningkat terhitung hampir selama 3 tahun. Terlepas dari pada itu meningkatnya proses belajar mengajar dikarenakan sejak mendapatkan sertifikasi cara mengajar guru mulai sedikit berbeda dibandingkan pada saat guru-guru tersebut belum mendapatkan sertifikasi karena metode cara belajar mengajar yang disampaikan guru-guru sudah bervariasi tidak monoton seperti sebelumnya. Begitu juga dengan peningkatan profesionalisme guru yang sudah disertifikasi sudah efektif dalam mengembangkan kompetensinya sebagai guru yang professional. Hal ini dapat terlihat peningkatan proses belajar mengajar yakni dikarenakan kemampuan guru menguasai materi pelajaran yang diampu, selain itu dampak yang dirasakan dari sertifikasi adalah semakin meningkatnya kesejahteraan sehingga guru-guru bisa

membeli dan mempersiapkan metode belajar dengan menggunakan elektronik. Dan juga Dari implementasi kebijakan sertifikasi guru yang dijalankan di SD 7 Singkawang mempunyai dampak yang mana dampak tersebut berpengaruh kepada kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai agen pembelajaran. salah satu contoh berpengaruhnya kebijakan sertifikasi guru di SD 7 Singkawang itu adalah misalnya guru yang biasa sering izin dengan adanya sertifikasi guru tersebut sudah tidak sering izin lagi, izin pun memang waktu-waktu tertentu yang memang sangat penting.namun kendala yang masih sangat penting yaitu pemberian insentif tunjangan profesi guru sering terhambat yang bisa membuat melemahnya motivasi bagi para guru untuk meningkatkan kinerjanya.

#### F. SARAN

Saran peneliti adalah untuk guru-guru diharapkan semakin meningkatkan kualitas kemampuan dirinya dalam memberikan proses pembelajaran salah satunya dengan meningkatkan kualifikasi akademik sehingga dalam pemberian sertifikasi ini tidak ada lagi yang berdasarkan umur minimal rata-rata sudah S1 untuk mengikuti syarat mendapatkan sertifikasi, bila perlu tidak hanya berhenti pada jenjang S1, dengan adanya tambahan tunjangan kesejahteraan para guru diharapkan guru pula mampu meningkatkan kualifikasi akademiknya hingga S2 yang mana dapat berguna selain meningkatnya profesionalisme bagi guru itu sendiri juga dapat menunjang karir agar guru-guru semakin dapat termotivasi meningkatkan kinerjanya untuk mendapatkan pangkat yang lebih tinggi misalnya tidak berhenti menjadi guru saja tetapi bisa untuk naik pangkat menjadi kepala sekolah dan sebagainya dengan demikian kesejahteraan dan martabat para guru akan semakin meningkat.

#### G. REFERENSI

- Asmani, Ma'mur, Jamal.2011. *Tips Sukses PLPG*. Yogyakarta: DIVA Press
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Dunn, W. 2004. *Manajemen Analisis Kebijakan Publik (edisi ke dua)*. Yogyakarta: Gajah mada University Press.
- Faisal, Sanapiah. 2002. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali

- Handoko, Hani, T. 2004. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BCSE.
- Javis, Peter, 1983. *Professional Education*. London: Croom Helm.
- Jenkins, 1978, *An introduction to the study of public policy*, California: Wadsworth, Inc.
- Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Saudagar, Fachruddin. 2009. *Pengembangan Profesionalitas Guru*. Jakarta: GP Press.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII
- Winarno, Budi, 2004, *Teori Kebijkasanaan Publik*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial UGM.
- Wahab, Saleh, 2006, *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

#### Dokumen Pemerintah :

- Undang-Undang RI, Nomor 14 Tahun 2005, tentang *Guru dan Dosen*. Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional RI.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasinal Nomor 18 Tahun 2007, Tentang *Sertifikasi Guru dan Dosen*.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 PENGELOLA JURNAL MAHASISWA  
 Jalan Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124  
 Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>  
 Email: [jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Rhesa Raviandi  
 NIM / Periode lulus : E01109010 / periode II  
 Fakultas/Jurusan : Fisip / IAN  
 E-mail address/HP : Raviandi\_rhesa@yahoo.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....\*) pada Program Studi..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul \*\*):

UPAYA Peningkatan Profesionalisme guru melalui program sertifikasi di SDN 7 Singkawang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui  
 Pengelola Jurnal ..... 27-2-2024  
  
DR. H. ARIFIN, M. AB  
 NIP. 197105021997011002

Dibuat di :  
 Pada tanggal:  
  
Rhesa Raviandi  
 nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:  
 \*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).